

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teoritis

2.1.1. Partisipasi

Partisipasi merupakan suatu konsep penting dalam proses pembangunan. Partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu kata “*participation*” yang dapat diartikan suatu kegiatan untuk membangkitkan perasaan dan diikutsertakan atau ambil bagian dalam kegiatan suatu organisasi (Ngongare *dkk*, 2019).

Hal ini serupa dengan Inu Kencana *dalam* Tahulending *dkk*, (2020) partisipasi dapat diartikan penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi, serta ambil bagian dalam setiap pertanggung jawaban bersama. Peran tersebut dapat mendorong individu untuk mengenal diri dan mengembangkan potensi yang akhirnya mendorong kemandirian.

2.1.2. Prinsip-prinsip Partisipasi

Dalam proses partisipasi memiliki prinsip-prinsip sebagaimana tertuang dalam Panduan Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif yang disusun oleh *Department For International Development (DFID)* (Seumampow, 2004 *dalam* Hajar *dkk*, 2018) adalah :

- a. Cakupan. Semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil-hasil suatu keputusan atau proses proyek pembangunan.
- b. Kesetaraan dan kemitraan (*Equal Partnership*). Pada dasarnya setiap orang mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa tersebut terlibat dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan struktur masing-masing pihak.
- c. Transparansi. Semua pihak harus dapat menumbuhkembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog.

- d. Kesetaraan kewenangan (*Sharing Power/Equal Powership*). Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi.
- e. Kesetaraan tanggung jawab (*Sharing Responsibility*). Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kesetaraan kewenangan (*sharing power*) dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya.
- f. Pemberdayaan (*Empowerment*). Keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain.
- g. Kerja sama. Diperlukan adanya kerjasama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan sumber daya manusia.

2.1.3. Bentuk Partisipasi

Bentuk-bentuk partisipasi menjadi siklus bagaimana proses dalam pembangunan dapat berjalan Menurut Cohen dan Uphoff (1997) dalam Sari (2019) terdapat empat bentuk dalam proses partisipasi masyarakat, yaitu :

- a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Partisipasi pada tahap ini merupakan penentuan alternatif masyarakat untuk menuju sepakat dari berbagai gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Masyarakat berpartisipasi dengan kehadiran dalam rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

- b. Partisipasi dalam pelaksanaan

Partisipasi pada tahap ini merupakan partisipasi seseorang dalam menggerakkan sumber dan dana sebagai penentu keberhasilan program yang dilaksanakan. Masyarakat dapat berpartisipasi dengan memberikan tenaga, uang, maupun barang.

c. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil

Partisipasi pada tahap ini berkaitan dengan kualitas dan kuantitas hasil pelaksanaan program yang bisa dicapai, seseorang terlibat dalam pemanfaatan suatu proyek pembangunan setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini berupa tenaga dan uang untuk mengoperasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun.

d. Partisipasi dalam evaluasi

Pada tahap ini berkaitan dengan pelaksanaan program secara menyeluruh yang bertujuan mengetahui bagaimana pelaksanaan program berjalan. Masyarakat berpartisipasi dengan melakukan pengawasan yang bertujuan memberikan masukan terhadap proses proyek atau program pembangunan.

2.1.4. Fungsi dan Manfaat Partisipasi

Penerapan konsep partisipasi ini memiliki fungsi dan tujuan, menurut Carter *dalam* Kaehe, (2019) bahwa fungsi dari partisipasi adalah :

- a. Partisipasi sebagai sebuah kebijakan
- b. Partisipasi sebagai strategi
- c. Partisipasi sebagai alat komunikasi
- d. Partisipasi sebagai terapi

Adapun manfaat dari partisipasi adalah :

- 1) Menuju masyarakat yang lebih bertanggung jawab
- 2) Meningkatkan proses belajar
- 3) Meminimalisir perasaan terasing
- 4) Menimbulkan dukungan dan penerimaan dari rencana pemerintah
- 5) Menciptakan kesadaran politik
- 6) Keputusan dari hasil partisipasi mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat
- 7) Menjadi sumber dari informasi yang berguna merupakan komitmen sistem demokrasi.

2.1.5. Kelompok tani

Kelompok dapat diartikan sebagai sekumpulan orang yang mempunyai tujuan bersama yang berinteraksi satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan bersama, mengenal satu dengan yang lain, dan memandang mereka sebagai bagian dari kelompok tersebut (Mulyana, 2005 *dalam* Ramadhani 2020). Para petani cenderung membentuk kelompok untuk mengembangkan usaha tani dan mengasah kemampuan kerja sama dalam suatu kegiatan berkelompok dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan anggota dan keluarganya.

Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani pengertian kelompok tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota. Tujuan dibentuknya kelompok tani supaya petani dapat menjalankan usaha taninya secara bersama-sama sehingga dapat meningkatkan dan mengembangkan usahatani yang dijalankan oleh anggota dan kelompok dengan beberapa prinsip kehidupan berkelompok diantaranya adalah prinsip partisipatif (Mardikanto, 2009 *dalam* Reza dkk, 2019).

Menurut Kiswanto, 2018 dalam bukunya “Kelompok Tani Mandiri”, ciri-ciri kelompok tani yakni : a). Saling mengenal, akrab dan saling percaya diantara sesama anggota, b). Mempunyai pandangan dan kepentingan yang sama dalam usaha tani, c). Memiliki kesamaan dalam tradisi dan atau pemukiman, hamparan usaha, jenis usaha, status ekonomi maupun sosial, bahasa, pendidikan dan ekologi, dan d). Ada pembagian tugas dan tanggung jawab sesama anggota berdasarkan kesepakatan bersama.

Adapun unsur pengikat kelompok tani adalah sebagai berikut :

- a. Adanya kepentingan yang sama diantara para anggotanya
- b. Adanya kawasan usaha tani yang menjadi tanggung jawab bersama diantara para anggotanya.
- c. Adanya kader tani yang berdedikasi untuk menggerakkan para petani dan kepemimpinannya diterima oleh sesama petani lainnya.

- d. Adanya kegiatan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh sekurang-kurangnya sebagian besar anggotanya.
- e. Adanya dorongan atau motivasi dari tokoh masyarakat setempat untuk menunjang program yang telah ditentukan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani menjelaskan terdapat tiga fungsi kelompok tani diantaranya yaitu :

1. Kelas belajar

Kelompok tani merupakan wadah belajar mengajar bagi anggotanya guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap (PKS) serta tumbuh dan berkembangnya kemandirian dalam berusaha tani, sehingga produktivitasnya meningkat, pendapatannya bertambah serta kehidupan yang lebih sejahtera. Kelompok tani diarahkan agar mempunyai kemampuan :

- a) Menggali dan merumuskan keperluan belajar
- b) Merencanakan dan mempersiapkan keperluan belajar
- c) Menjalin kerjasama dengan sumber informasi yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang berasal dari sesama petani, instansi pemerintah
- d) Menciptakan iklim lingkungan belajar yang sesuai.
- e) Berperan aktif dalam proses belajar mengajar.
- f) Mengemukakan dan memahami keinginan, pendapat, masalah yang dihadapi anggota kelompok tani.
- g) Merumuskan kerjasama, baik dalam pemecahan masalah, maupun kegiatan lain.
- h) Merencanakan dan melaksanakan pertemuan berkala.

2. Wahana kerjasama

Kelompok tani merupakan tempat untuk memperkuat kerjasama diantara sesama petani dalam kelompok tani dan antar kelompok tani serta dengan pihak lain. Sebagai wahana kerjasama hendaknya kelompok tani mempunyai kemampuan:

- a) Menciptakan suasana saling kenal, saling percaya mempercayai dan selalu berkeinginan untuk bekerja sama.

- b) Menciptakan suasana keterbukaan dalam menyatakan pendapat untuk mencapai tujuan bersama.
- c) Mengatur dan melaksanakan pembagian tugas/kerja diantara sesama anggota sesuai kesepakatan.
- d) Mengembangkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab.
- e) Merencanakan dan melaksanakan musyawarah agar tercapai kesepakatan yang bermanfaat.
- f) Mentaati dan melaksanakan kesepakatan.
- g) Menjalankan kerjasama/kemitraan usaha dengan pihak penyedia saprodi dll.
- h) Mengadakan pemupukan modal.

3. Unit produksi

Unit produksi merupakan usaha tani yang dilaksanakan oleh masing-masing anggota kelompok tani, secara keseluruhan harus dipandang sebagai satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala ekonomi, baik dipandang dari segi kuantitas, kualitas maupun kontinuitas. Sebagai unit produksi, kelompok tani diarahkan untuk memiliki kemampuan sebagai berikut:

- a) Mengambil keputusan dalam menentukan pengembangan produksi yang menguntungkan berdasarkan informasi yang tersedia dalam bidang teknologi, sosial, permodalan, saprodi, dan sumberdaya alam lainnya.
- b) Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan bersama dan rencana kebutuhan kelompok atas dasar pertimbangan efisiensi.
- c) Memfasilitasi penerapan teknologi (bahan, alat, cara) usaha tani para anggotanya sesuai dengan rencana kegiatan kelompok.
- d) Menjalinkan kerjasama/kemitraan dengan pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan usaha tani.
- e) Menaati dan melaksanakan kesepakatan yang dihasilkan bersama dalam organisasi, maupun kesepakatan dengan pihak lain.
- f) Mengevaluasi kegiatan bersama dan rencana kebutuhan kelompok sebagai bahan rencana kegiatan yang akan datang.
- g) Meningkatkan kesinambungan produktivitas dan kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan.
- h) Mengelola administrasi secara baik. (Kiswanto, 2018).

2.1.6. Pemberdayaan Masyarakat

Secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan dan kemampuan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata (Eddy Ch. Papilaya, 2001 *dalam* Zubaedi 2013).

Pengertian pemberdayaan menurut Sharldlow, (1998) *dalam* Adi (2012) mengemukakan pemberdayaan pada intinya membahas mengenai individu, kelompok maupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Melakukan pemberdayaan pada masyarakat sama dengan melakukan investasi pada masyarakat. Penciptaan kondisi pada masyarakat dapat melalui kegiatan yang membentuk suasana yang memungkinkan terjadinya pengembangan potensi masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dalam konsep pembangunan ekonomi merangkum nilai-nilai sosial yang bersifat *people centered* (berpusat pada manusia), *Participatory* (partisipatif), *empowering* (*memberdayakan*) and *sustainable* (berkelanjutan) (Robert Chambers *dalam* Hamid 2018).

Pemberdayaan pada masyarakat mengandung beberapa unsur yang saling terikat dan saling mendukung. Menurut Hasan dan Azis, (2019) unsur-unsur pemberdayaan masyarakat pada umumnya adalah :

1. Inklusi dan partisipasi
2. Akses pada informasi
3. Kapasitas organisasi lokal
4. Profesionalitas pelaku pemberdaya.

Unsur inklusi mengarah kepada makna siapa yang akan diberdayakan sedangkan unsur partisipasi mengarah pada proses terjadinya pemberdayaan dan peran dari individu atau kelompok yang akan diberdayakan. Unsur akses informasi dalam pemberdayaan berarti adanya kemudahan dan transparansi informasi baik berupa pengetahuan, program, kinerja pemerintah serta hak dan kewajiban dalam masyarakat baik antara masyarakat dengan masyarakat lain dan antara masyarakat dengan pemerintah. Unsur kapasitas organisasi lokal mencakup kemampuan masyarakat untuk bisa bekerja bersama, mengorganisasikan perorangan dan

kelompok-kelompok yang ada di dalamnya, memobilisasi sumber-sumber daya yang ada untuk menyelesaikan masalah bersama. Unsur profesionalitas pelaku pemberdaya adalah kemampuan pelaku pemberdaya, yaitu aparat pemerintah atau LSM, untuk mendengarkan, memahami, mendampingi dan melakukan tindakan yang diperlukan untuk melayani kepentingan masyarakat.

Proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan, pertama adalah proses pemberdayaan menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dilengkapi dengan upaya membangun aset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi. Kecenderungan pemberdayaan jenis ini disebut kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. Kedua, kecenderungan pemberdayaan yang dipengaruhi oleh konsientisasi atau pemahaman terhadap situasi yang terjadi baik dalam relasi politik, ekonomi dan sosial (Priyono, Onny, S, 1996 *dalam* Zubaedi 2013).

Menurut Hogan (2000) *dalam* Adi (2012) dalam proses pemberdayaan yang berkesinambungan sebagai suatu siklus terdiri dari lima tahapan utama, yaitu :

1. Menghadirkan kembali pengalaman yang memberdayakan dan tidak memberdayakan (*recall depowering/empowering experiences*).
2. Mendiskusikan alasan mengapa terjadi pemberdayaan dan penidakberdayaan (*discuss respons for depowerment/empowerment*).
3. Mengidentifikasi suatu masalah ataupun proyek (*identify one problem or project*).
4. Mengidentifikasi basis daya yang bermakna untuk melakukan perubahan (*identify useful power bases*).
5. Mengembangkan rencana-rencana aksi dan mengimplementasikannya (*develop and implement action plans*).

2.1.7. Pengertian *Corporate Social Responsibility*

Pengertian CSR memiliki banyak arti menurut para ahli, namun pada kesimpulannya CSR adalah bentuk kepedulian dan tanggung jawab perusahaan dalam kegiatan operasionalnya kepada masyarakat yang berada di sekitarnya melalui program-program yang dirancang dengan tujuan meningkatkan

kesejahteraan. Istilah CSR pertama kali dikenalkan pada tulisan *Social Responsibility of the Businessman* tahun 1953 yang digagas oleh Howard Rothman Browen yang mengungkapkan bahwa *Corporate Social Responsibility (CSR)* sebagai sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka (Wati, 2019).

Johnson and Jhonson, (2006) dalam Hadi, (2018) mengungkapkan “*Corporate Social Responsibility (CSR) is about how companies manage the business processes to produce an overall positive impact on society*” yang bermakna bahwa dalam proses kegiatan operasional sebuah perusahaan seharusnya memberikan dampak baik kepada sosialnya. Dalam versi *The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)* in fox, et al, (2002) dalam Gunawan (2014), CSR merupakan komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan, dan masyarakat setempat (lokal) dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan.

Terdapat beberapa bentuk pelaksanaan CSR di lapangan, menurut Gunawan (2014) dalam bukunya terdapat tiga bentuk pelaksanaan CSR di lapangan, salah satunya CSR berbentuk pemberdayaan masyarakat. Pelaksanaan CSR melalui pemberdayaan masyarakat berbasis *Corporate Citizenship* merupakan upaya dalam memajukan kehidupan masyarakat dengan tujuan menciptakan hubungan baik dan selaras antara masyarakat dan perusahaan agar merasa diuntungkan dengan keberadaan perusahaan di lingkungannya.

Banyak para ahli yang mengungkapkan mengenai prinsip dalam pelaksanaan CSR, Crowther David (2008) dalam Hadi (2018) menguraikan prinsip-prinsip CSR menjadi 3, yaitu :

1. *Sustainable*

Merupakan keberlanjutan aktivitas perusahaan dimasa depan dengan memperhitungkan sumber daya. Keberlanjutan berputar pada keberpihakan dan upaya *society* memanfaatkan sumber daya tetap memperhatikan generasi yang akan datang. Definisi tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan daya dukung ekosistem.

2. *Accountability*

Sikap perusahaan yang terbuka dan bertanggung jawab atas aktivitas yang telah dilakukan. akuntabilitas dibutuhkan ketika aktivitas perusahaan mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan eksternal. Tingkat akuntabilitas dan tanggung jawab perusahaan menentukan legitimasi stakeholder eksternal,serta meningkatkan transaksi saham perusahaan (Memed, 2002, Belkaoui dan Karpik, 1989). Agar informasi dalam laporan perusahaan sebagai wujud akuntabilitas memenuhi kualifikasi, maka akuntabilitas seharusnya mencerminkan karakteristik, antara lain : (1) *understandability to all parties concerned*, (2) *relevance to users of the information provided*, (3) *reliability and term of accuarcy of measurement,representation of impact and freedom for bias*, and (4) *comparability, which implies consistency, both over time and between different organisations*.

3. *Transparency*

Merupakan prinsip penting bagi pihak eksternal. Transparansi bersinggungan dengan pelaporan aktivitas perusahaan berikut dampak terhadap pihak eksternal. Transparansi merupakan satu hal yang amat penting bagi pihak eksternal, berperan untuk mengurangi asimetri informasi dan pertanggungjawaban berbagai dampak dari lingkungan.

Ragam tanggung jawab perusahaan terdiri dari tiga dimensi, yaitu :

- a) *Economic responsibility* : keberadaan perusahaan ditujukan untuk meningkatkan nilai bagi *shareholder*, seperti : meningkatkan keuntungan (laba), harga saham, pembayaran dividen, dan jenis lainnya.
- b) *Legal responsibility* : sebagai bagian dari masyarakat, perusahaan memiliki tanggung jawab mematuhi peraturan perundangan yang berlaku.
- c) *Social responsibilty* : merupakan tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan dan para pemangku kepentingan.

2.1.8. Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Partisipasi

a. Umur

Umur adalah ukuran lamanya seseorang dapat hidup dan diukur dengan satuan tahun. Bahua (2014) dalam bukunya mengemukakan, umur merupakan suatu

faktor produktivitas individu dalam meningkatkan kinerja pekerjaan karena umur sangat berhubungan dengan tingkat kedewasaan individu dalam bertindak.

Umur seseorang dapat dibagi dalam beberapa rentang atau kelompok, salah satu kategori atau kelompok umur menurut Departemen Kesehatan RI *dalam* Amin (2017) yaitu, masa balita (0-5 tahun), masa kanak-kanak (6-11 tahun), masa remaja awal (12-16 tahun), masa remaja akhir (17-25 tahun), masa dewasa awal (26-35 tahun), masa dewasa akhir (36-45 tahun), masa lansia awal (46-55 tahun), masa lansia akhir (56-65 tahun), masa manula (65-atas). Umur produktif seseorang berada pada rentang 15-64 tahun. Umur pekebun yang dalam hal ini adalah umur responden hidup sampai dengan pengkajian dilakukan.

b. Luas Lahan

Lahan merupakan sarana petani dalam berusahatani untuk memperoleh hasil produksi. Menurut Mandang (2020) mengemukakan luas lahan merupakan sesuatu yang penting dalam melakukan proses produksi atau usaha tani karena luas lahan mempengaruhi besarnya produksi yang diusahakan dan kesejahteraan yang akan diperoleh oleh petani. Berdasarkan *Food and Agriculture Organization* (FAO) membagi lahan pertanian menjadi lahan garapan, lahan tanaman permanen, dan lahan penggembalaan. Luas usahatani memberikan pengaruh pada proses pengambilan keputusan petani terhadap suatu program karena semakin luas lahan usahatani yang diusahakan maka petani akan semakin selektif dalam mengambil keputusan.

c. Pendidikan Formal

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang ditempuh seseorang dan dimulai dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah, hingga pendidikan di perguruan tinggi. Pendidikan merupakan salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi dan mempengaruhi seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat (Uceng *dkk*, 2019).

d. Pendapatan

Pendapatan adalah suatu hasil yang diharapkan dapat diperoleh dari suatu usaha yang telah dilakukan, besar atau kecilnya pendapatan dipengaruhi oleh volume hasil produksi yang diusahakan. Menurut Turner *dalam* Nurbaiti (2017) tingkat pendapatan akan memberi peluang yang besar bagi masyarakat untuk ikut

berpartisipasi karena mempengaruhi kemampuan finansial untuk berinvestasi dengan mengerahkan semua kemampuannya apabila hasil yang dicapai sesuai dengan kebutuhan prioritas dan kebutuhannya. Pendapatan yang dimaksud dalam pengkajian ini adalah hasil yang diperoleh pada semua usaha yang dilakukan petani untuk memenuhi kebutuhannya selama pengkajian dilakukan.

e. Motivasi

Secara umum motivasi dapat diartikan sebagai dorongan dari dalam atau luar diri seseorang untuk melakukan sesuatu. Motivasi menjadi hal yang mendasari keinginan seseorang dalam melakukan suatu kegiatan, biasanya timbul dari dorongan dalam diri atau faktor-faktor luar yang mempengaruhi sehingga menimbulkan motivasi. Menurut Nevid (2009) pada bukunya yang berjudul “Motivasi dan Emosi”, motivasi bermakna faktor-faktor yang mengaktifkan, mengarahkan, dan mempertahankan perilaku terarah tujuan.

f. Kepemimpinan Ketua Kelompok

Kepemimpinan adalah sebuah kemampuan pada diri seseorang yang dapat mempengaruhi orang lain atau kelompok dengan perintah atau pemberian informasi untuk mencapai tujuan tertentu. Indikator untuk melihat kepemimpinan ketua yaitu peran kepemimpinan, perilaku kepemimpinan, dan gaya kepemimpinan (Muhdlor, 2018). Kepemimpinan yang dimaksud dalam pengkajian ini adalah kepemimpinan ketua kelompok dalam kelembagaan dan hubungannya dengan tingkat partisipasi petani dalam pelaksanaan program CSR di bidang perkebunan.

g. Peran Stakeholder

Pendekatan *stakeholder* adalah keinginan untuk membangun suatu kerangka kerja yang responsif terhadap masalah yang dihadapi manajer yaitu perubahan lingkungan. Tujuan dari manajemen *stakeholder* adalah merancang metode untuk mengelola berbagai kelompok dan hubungan yang dihasilkan dengan cara yang strategis. Definisi *stakeholder* menurut Freeman dan McVea adalah setiap individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi (Freeman dan McVea, 2001 dalam Angelica dkk, 2021).

2.2. Hasil Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan penelitian terdahulu yang digunakan penulis sebagai sumber literatur dalam mendukung penyusunan tugas akhir yang berjudul “Partisipasi Kelompok Tani Dalam Pelaksanaan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara”

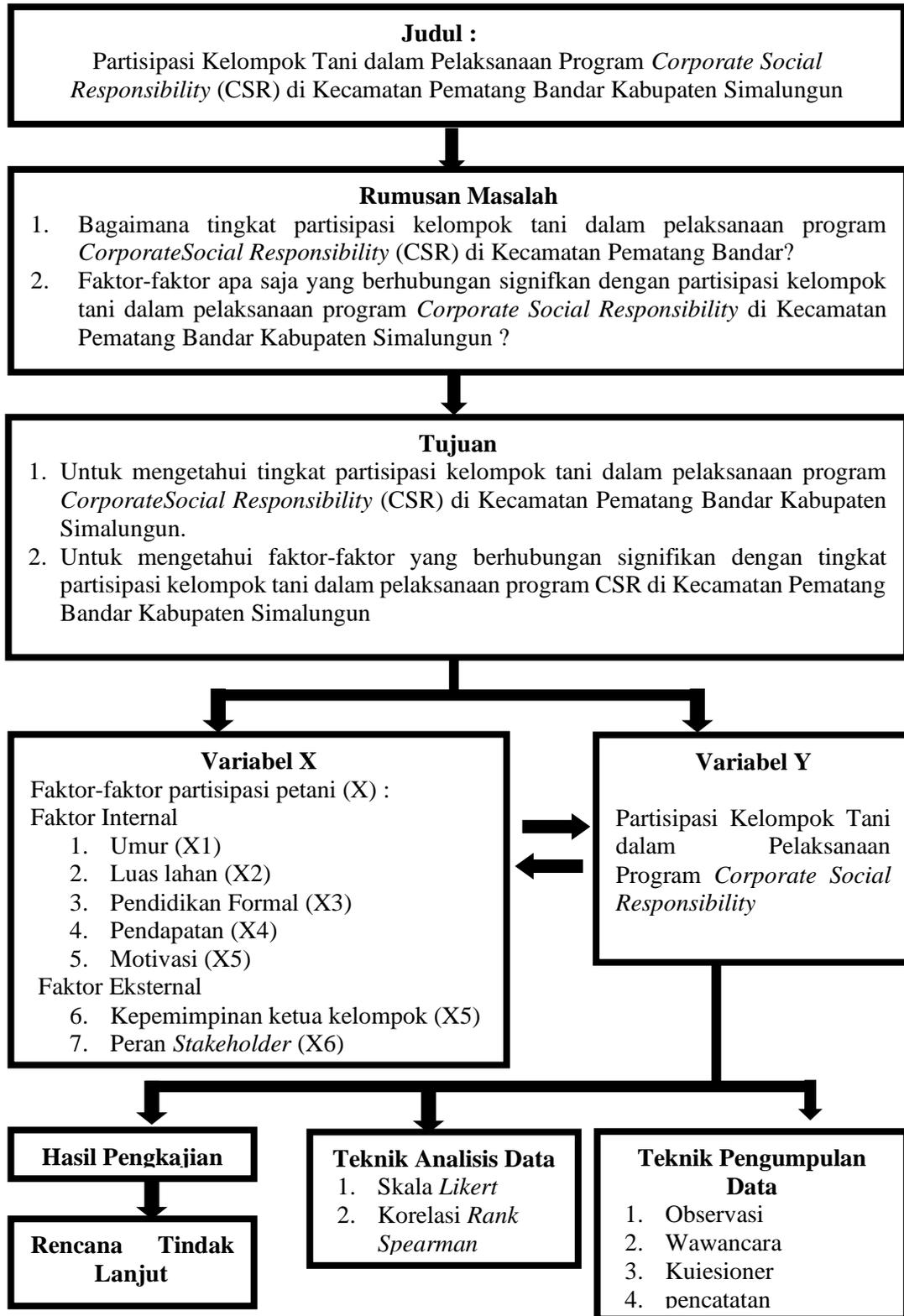
Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Judul dan Penulis	Variabel	Metode	Hasil
1	Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Petani dalam Kegiatan Pengolahan Pupuk Organik di Desa Banjaratma, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes (Nisita Wuri, Sugihardjo, Agung Wibowo 2021)	Umur, pendidikan formal dan non formal petani, pekerjaan serta akses komunikasi.	Metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif	Pada pelaksanaannya, berbagai faktor yang mempengaruhi partisipasi petani Kelompok Tani Bahagia IV dalam kegiatan Pengolahan pupuk organik meliputi umur, pendidikan formal dan atau nonformal petani, pekerjaan dan akses komunikasi.
2	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Petani dalam Program Asuransi Usahatani Padi (AUTP) di Desa Watugede, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang (Thalia Malirisa marphy, Dina Novia 2019)	Usia, pendidikan, pengalaman, luas lahan, pendapatan.	Metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa faktor usia, pendidikan, pengalaman usahatani, luas lahan dan pendapatan secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap tingkat partisipasi petani dalam program AUTP. Secara parsial usia, pendidikan dan pengalaman usahatani memiliki pengaruh positif dan signifikan sedangkan faktor luas lahan dan pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat partisipasi petani dalam program AUTP.
3	Pengaruh Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Program <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Kasus PT. Indocement Tunggal Prakasa Tbk Program “Koperasi Rancage” Desa Pasir Mukti, Kecamatan Citeureup,	Tahap pengambilan keputusan, tahap pelaksanaan, tahap menikmati hasil dan tahap evaluasi.	Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kombinasi yang mengkombinasikan antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara tingkat partisipasi masyarakat terhadap efektivitas program CSR. Hal ini disebabkan karena partisipasi merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan program CSR.

Lanjutan Tabel 1

	Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Sulistia Rahayu Arief, Fredian Tonny Nasdian , 2020)			
4	Partisipasi Petani dalam Pelaksanaan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) di Kecamatan Selesai Kabupaten Langkat(Miftah Aulifa , 2019)	Luas lahan, pendapatan, Motivasi, Tabungan, Pengalaman, Bantuan Modal, Ketersediaan saprodi	Teknik statistik rank spearman	Terdapat hubungan signifikan antara faktor luas lahan, pendapatan, motivasi, pengalaman, bantuan modal dan ketersediaan sarana produksi dengan partisipasi petani dalam pelaksanaan program peremajaan sawit rakyat (PSR) .

2.3. Kerangka Pikir



Gambar 1. Prosedur penelitian Partisipasi Kelompok Tani dalam Pelaksanaan Program *Corporate Social Responsibility*

2.4. Hipotesis

1. Diduga tingkat partisipasi kelompok tani dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Kecamatan Pematang Bandar masih rendah.
2. Diduga adanya hubungan antara faktor umur, luas lahan, pendapatan, motivasi, kepemimpinan ketua kelompok dan peran *Stakeholder* terhadap Partisipasi Kelompok Tani dalam Pelaksanaan Program *Corporate Social Responsibility* di Kecamatan Pematang Bandar Kabupaten Simalungun.